

	News Title : Bappebti Blokir 1.855 Situs Entitas PBK Ilegal	
	Media Name : Koranjakarta.com	Journalist : Muchamad Ismail
	Publish Date : 02 February 2024	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 2,250,000
	Resources : Kasan (Plt. Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan)	Ads Value : 750,000
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Blokir Domain Situs Web Situs Ilegal

Bappebti Blokir 1.855 Situs Entitas PBK Ilegal

© Jumat, 02 Februari 2024 08:39 WIB · Waktu Baca 2 menit



Foto : istimewa

A A A Pengaturan Font

JAKARTA-Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan pada 2023 memblokir 1.855 situs web yang melakukan kegiatan penawaran ilegal di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Pemblokiran bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.

"Penawaran melalui kegiatan promosi, iklan dan/atau pelatihan PBK ilegal masih marak terjadi di Indonesia melalui media sosial, situs web, maupun penggunaan aplikasi ponsel pintar (smartphone). Untuk itu, masyarakat diimbau agar selalu berhati-hati terhadap penawaran yang dilakukan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab," ungkap Plt. Kepala Bappebti Kasan di Jakarta, Kamis (1/2).

Kasan menjelaskan Bappebti secara rutin dan berkelanjutan terus melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat merasa aman serta terhindar dari modus-modus penipuan dan potensi kerugian dari kegiatan PBK ilegal. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif melaporkan ke Bappebti bila menemukan adanya penawaran kegiatan ilegal di bidang PBK.

"Upaya tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Bappebti dengan masyarakat dalam memberantas kegiatan ilegal di bidang PBK. Bappebti berharap semakin banyak bentuk kolaborasi yang dibangun antara Bappebti dengan masyarakat, maka akan mengoptimalkan upaya pemberantasan aktivitas PBK ilegal yang saat ini tengah dilakukan," jelas Kasan.

Baca Juga :
[Bappebti Selesaikan Aduan Nasabah secara Berjenjang](#)

Upaya Hukum

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Aldison menegaskan setiap pihak yang melakukan kegiatan PBK di Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Entitas ilegal yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia. "Jika ditemukan adanya kegiatan di bidang PBK tanpa memiliki izin, maka Bappebti akan melakukan langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku," tegas Aldison.

Situs web PBK ilegal yang telah dilakukan pemblokiran oleh Bappebti dapat dilakukan normalisasi apabila entitas pemilik situs web tersebut bertitikad baik untuk mengurus perizinan ke Bappebti.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya pembinaan terhadap entitas ilegal untuk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK.